LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA BONTANG

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bontang tahun 2016 ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tahunan Instansi Pemerintah atas pelaksanaan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah ini menguraikan tentang perjanjian kinerja yang telah ditetapkan Sekretariat Daerah beserta capaian indikator kinerja pada tahun 2016. Capaian indikator kinerja tersebut akan memanifestasikan keberhasilan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah juga berfungsi sebagai salah satu bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah ini tentunya masih memiliki kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perbaikan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi Sekretaris Daerah dan pihak terkait dalam upaya pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah serta penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan pembangunan yang efektif dan efisien.

Bontang, Maret 2017
Sekretaris Daerah

H. M. Syirajudin, SH.,MT.
NIP. 19660208 198701 1003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas LKIP mengamanatkan setiap instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah tahun 2016 mengacu pada Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 dan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah tahun 2016 merupakan alat ukur tingkat keberhasilan perjalan Sekretariat Daerah dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini dilakukan dengan membandingkan Renstra dan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan.

Pada tahun 2016 capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah disajikan secara singkat sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja Nilai LPPD dan Nilai Akuntabilitas Kinerja. ***Indikator Pertama*** yaitu nilai LPPD dengan target nilai ST (Sangat Tinggi) realisasi ST (Sangat Tinggi) sehingga capaiannya sebesar 100%. ***Indikator Kedua*** yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target nilai B (Baik) realisasi B (Baik) sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Meningkatnya harmonisasi Penataan Produk Hukum Daerah dengan indikator Persentase target tersusunnya produk hukum daerah yang harmonis dimana targetnya yaitu 100% dengan realisasi 416,67% sehingga capaiannya sebesar 416,67%

Capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah seperti yang diuraikan diatas merupakan hasil komitmen dan kerja sama dari seluruh aparatur dan pihak terkait untuk melaksanakan janji yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja Sekretariat Daerah.

Sekretaris Daerah

H.M Syirajudin, SH.,MT
NIP. 19660208 198701 1 003

DAFTAR ISI

			Halaman
Kata Pengantar			i
IkhtisarEksekutif			ii
Daftar Isi			iv
Daftar Tabel			v
Daftar Grafik			vi
Daftar Gambar			vii
BAB. I	PENDAHULUAN		
	1.1	Gambaran Umum Organisasi	1
	1.2	Aspek Strategis Organisasi	2
	1.3	Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	3
	1.4	Struktur Organisasi	4
	1.5	Sumber Daya Manusia	4
BAB. II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA		
	2.1	Rencana Strategis	5
	2.1.1	Visi	5
	2.1.2	Misi	5
	2.1.3	Tujuan	6
	2.1.4	Sasaran	6
	2.1.5	Indikator Kinerja Utama	7
	2.1.6	Strategi dan Kebijakan	8
	2.2	Perjanjian Kinerja	9
	2.3	Program dan Kegiatan	10
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA		
	3.1	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2015	13
	3.2	Pengukuran Capaian Kinerja	15
	3.3	Analisis Capaian Kinerja	15
	3.4	Realisasi Anggaran	27
BAB IV	PENUTUP		28
LAMPIRAN			

DAFTAR TABEL

TABEL BAB.II

Tebel 2.1	Tujuan	6
Tabel 2.2	Sasaran	7
Tabel 2.3	Indikator Kinerja	7
Tabel 2.4	Strategi dan Kebijakan	8
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja 2016	9
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja 2016	9
Tabel 2.7	Program dan Kegiatan	11

TABEL BAB III

Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja 2016	15
Tabel 3.2	Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2016 (Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja)	16
Tabel 3.3	Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	17
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Tahun sebelumnya dengan Realisasi Tahun 2016 (Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja	17
Tabel 3.5	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan target Renstra (Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja)	19
Tabel 3.6	Tingkat Efisiensi Anggaran (Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja)	19
Tabel 3.7	Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2016 (Indikator Nilai LPPD)	20
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Tahun sebelumnya dengan Realisasi Tahun 2016 (Indikator Nilai LPPD)	21
Tabel 3.9	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan target Renstra (Indikator Nilai LPPD)	22
Tabel 3.10	Tingkat Efisiensi Anggaran (Indikator Nilai LPPD)	23
Tabel 3.11	Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2016 (Indikator Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis)	24
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Tahun sebelumnya dengan Realisasi Tahun 2016 (Indikator Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis)	24
Tabel 3.13	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan target Renstra (Indikator Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis)	26
Tabel 3.14	Tingkat Efisiensi Anggaran (Indikator Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis)	27
Table 3.15	Realisasi Anggaran	28

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perbandingan Skor dari Tahun 2013 s/d 2016 (Indikator Nilai Akuntabilitas)	19
Grafik 3.2	Perbandingan Skor dari Tahun 2013 s/d 2016 (Indikator Nilai LPPD)	21
Grafik 3.3	Perbandingan Skor dari Tahun 2013 s/d 2016 (Indikator Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis)	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Dokumentasi Nilai Akuntabilitas Kinerja 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Dasar pembentukan Sekretariat Daerah Kota Bontang adalah Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2008 tentang OrganisasiSekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bontang.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Penerapan manajemen berbasis kinerja mengharuskan setiap instansi pemerintah dan unit organisasi mampu merumuskan dan menetapkan indikator kinerja yang spesifik dan terukur. Aspek Strategis Sekretariat Daerah Kota Bontang adalah sebagai SKPD yang mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan pengkoordinasian organisasi perangkat daerah dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

1.3. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

   Menurut Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kota Bontang adalah Membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian organisasi perangkat daerah dan lembaga lain di lingkungan pemerintah Kota Bontang

2. Fungsi

   Fungsi Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi

dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kota Bontang adalah:

a. Perancanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
b. Pembinaan, pengarahan, perumusan kebijakan, pengoordinasian, pengendalian dan pengevaluasian terhadap penyelenggaraan urusan organisasi perangkat daerah dan lembaga lain dilingkungan Pemerintah Kota Bontang;
c. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
d. Pelaksanaan tugas lain-lain.

1.4. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Bontang ditunjang dengan struktur organisasi berdasarkan peraturan daerah Kota Bontang nomor 2tahun 2015 tentang perubahan kedua peraturan daerah Kota Bontang nomor 5 tahun 2008tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana pada gambar berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

1.5. Sumber Daya Manusia

Sekretariat Daerah Kota Bontang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 memiliki PNS sebanyak 128 orang dan Non PNS sebanyak 111 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Sumber Daya Manusia

Pangkat/Gol Ruang						Jenis Kelamin			Pendidikan						Jumlah Pegawai
Eselon				Staf	Non PNS	L	P	S2	S1	D1	D3	SLTA	SLTP	SD	
I	II	III	IV												
	9	8	20	94	115	181	65	20	55	2	24	124	8	13	`246

Sumber: Bag. Tata Usaha (Umum&Kepegawaian)

1.6. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang Dihadapi Organisasi

Dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal dan meningkatkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, Sekretariat Daerah tidak lepas dari permasalah-permasalah yang mempengaruhi kelancaran perjalanan organisasi. Permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Perubahan anggaran tahun 2016, semula anggaran yang ditetapkan diawal Tahun sebesar Rp. 121. 942.538.327 setelah adanya rasionalisasi maka anggaran menjadi sebesar Rp 121.901.421.213
2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan *time schedule* yang telah ditetapkan yang berakibat pada peningkatan beban kerja yang sangat tinggi pada semester kedua.
3. Regulasi yang cepat memerlukan kepekaan dan kemampuan sumber daya manusia yang memadai baik saat perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah yang saat ini dijadikan salah satu instrumen pertanggung jawaban.

Rencana Strategis yang digunakan sebagai dasar penyusunan LKIP Tahun 2016 adalah Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021.

2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran masa depan yang akan diraih dalam waktu telah ditentukan, dalam hal ini diharapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dapat dituntaskan di Tahun 2016-2021.

Visi Kota Bontang adalah:

Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kota Bontang ditetapkan Misi. Misi merupakan suatu yang menyebabkan Instansi/Lembaga menjadi ada atau diadakan dan harus diemban oleh setiap Instansi/Lembaga agar tujuan organisasi terwujud secara efektif dan efisien. Misi Kota Bontang adalah sebagai berikut:

1. **Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas SDM**
2. **Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**
3. **Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui Kegiatan Pengembangan Perekonomian Berbasis Sektor Maritim**

2.1.3. Tujuan

Sekretariat Daerah menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam Perencanaan Strategi Tahun 2016-2021. Tujuan tersebut adalah:

Tabel 2.1
Tujuan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai LPPD		Nilai LPPD	ST
		Persentase Target tersusunnya produk hukum daerah yang harmonis	Meningkatnya Harmonisasi Penataan Produk Hukum Daerah	Persentase Target tersusunnya produk hukum daerah yang harmonis	100%

Sumber data: Renstra 2016-2021

2.1.4. Sasaran

Sekretariat Daerah telah menetapkan tujuan yang akan dicapai 5 (lima) tahun mendatang di tahun 2016-2021, maka untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkanlah sasaran sebagai berikut:

Tabel.2.2
Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja
		Nilai LPPD
2	Meningkatnya Harmonisasi Penataan Produk Hukum Daerah	Persentase Target Tersusunya Produk Hukum Daerah yang harmonis

Sumber data: Renstra 2016-2021

2.1.5 Indikator Kinerja

Sekretariat Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa depan. Indikator kinerja utama akan menjadi tolok ukur kinerja Pimpinan SKPD dalam kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai LKIP Kota Bontang	Bag. Organisasi
		Nilai LPPD	Nilai LPPD Kota Bontang	Bag. Pemerintahan
2	Meningkatnya Harmonisasi Penataan Produk Hukum Daerah	Persentase Target tersusunnya Produk Hukum Daerah yang harmonis	(Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan/Jumlah Produk Hukum yang direncanakan) x 100%	Bag. Hukum
3	Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase Kebijakan Perekonomian Darah yang adaptif sesuai dengan peraturan perundang-	(Jumlah Peraturan Keijakan prekekonomian yang ditetapkan/Jumlah Peraturan Keijakan Perekonomian yang direncanakan)x 100%	Sosek

		undangan		

2.1.6 Strategi dan Kebijakan

Sekretariat Daerah menetapkan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan tersebut diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Strategi Kebijakan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja yang transparan dan akuntabel	Menyusun dokumen perencanaan yang matang sebagai basis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
		Nilai LPPD		Mneyusun dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai fieed back peningkatan kinerja
2	Meningkatnya Harmonisasi Penataan Produk Hukum Daerah	Persentase target tersusunnya produk hukum daerah yang harmonis	Menyusun Produk hukum daerah berdasarkan program legislasi daerah	Penataan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan daerah melalui uji publik dan

				tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi

Sumber data: Renstra 2016-2021

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja yang mencakup sasaran, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai akan menjadi komitmen Sekretaris Daerah sebagai kepala SKPD kepada Pimpinan Daerah. Perjanjian kinerja tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Terpublikasinya informasi pembangunan Pemerintah Kota Bontang	Persentase informasi pembangunan yang terpublikasi	%	100,00
2	Penataan kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100,00
3	Tersusun dan terpublikasinya produk hukum daerah	Jumlah produk hukum daerah	dokumen	84,00
		Persentase produk hukum daerah yang terpublikasi	%	100,00
4	Meningkatnya kinerja penyelenggara pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai	Sangat Tinggi
		Persentase kecamatan berkinerja baik	%	66,67
		Persentase kelurahan berkinerja baik	%	80,00

5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kota Bontang	Nilai	B
		Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	B
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Persentase temuan BPK	%	0
		Persentase temuan Inspektorat	%	0
7	Terarahnya pelaksanaan Pembangunan	Capaian kinerja pembangunan daerah	%	100,00

Sekretariat Daerah menyusun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang mengacu pada Dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang menjadi dasar pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2016. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	B
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	ST
2	Meningkatnya Harmonisasi Penataan Produk Hukum Daerah	Persentase Target tersusunnya produk hukum daerah yang harmonis	%	100

2.3. Program dan Kegiatan

Rincian Program dan Kegiatan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Program dan Kegiatan

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan
Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatanya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang
		Nilai LPPD	Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Meningkatnya Harmonisasi Penataan Produk Hukum Daerah	Persentase target tersusunnya produk hukum daerah yang harmonis	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan dan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah

Sumber data: Renstra 2016-2021, DPA 2016

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2015

1. Melakukan perbaikan terhadap dokumen Renstra agar menyajikan indikator kinerja tujuan secara lengkap serta menetapkan indikator dan target kinerja sesuai dengan kriteria SMART
2. Agar dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
3. Agar dokumen Penetapan Kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan, dimonitor pencapaiannya secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
4. Melakukan perbaikan terhadap IKU agar disusun sesuai dengan kriteria SMART
5. Agar IKU dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala dan untuk penilaian kinerja
6. Segera menyusun mekanisme pengumpulan data yang memadai (pedoman atau SOP) dan pedoman evaluasi kinerja agar diperoleh hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang memadai
7. Melakukan perbaikan terhadap penyusunan dokumen LAKIP agar lebih lengkap dalam menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan, data pembanding, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya
8. Agar informasi kinerja digunakan untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
9. Agar melakukan evaluasi internal khususnya evaluasi program yang memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan. Selanjutnya hasil evaluasi program/ akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan kinerja organisasi
10. Melakukan penyempurnaan, pemantauan dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Kinerja yang telah disusun untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang

Tindak Lanjut yang dilakukan :

1. Melakukan Perbaikan penyusunan Dokumen Renstra Tahun 2011-2016 dengan menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021
2. Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran di Tahun 2017
3. Melakukan Review terhadap Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2016 dengan kriteria SMART
4. Sekretariat Daerah telah menyusun mekanisme pengumpulan data yang memadai (pedoman atau SOP) dan pedoman evaluasi kinerja (bukti terlampir)
5. Melakukan perbaikan penyajian pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan mengacu/berpedoman pada Format Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 yang tertuang dalam Surat Sekretariat Daerah Nomor 060/002/Org.2 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, PK Perubahan Tahun 2016 serta IKU Tahun 2016 Tanggal 3 Januari 2017.
6. Menyusun Rencana Aksi Sekretariat Daerah Tahun 2016

Kendala dan Solusi dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Kendala dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2016 ini adalah tidak relevannya antara Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan Review Renstra Tahun 2011-2016 yang dilakukan di Tahun 2013, <u>oleh karena itu</u> Sekretariat Daerah menyusun Renstra Tahun 2016-2021 sebagai perbaikan, membuat Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Melakukan Review terhadap Indikator Kinerja Utama sebagai dasar Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Tahun 2016.

3.2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan target yang ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai selama Tahun 2016. Adapun Pengukuran Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Real	% Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	ST	ST	100
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	B	100
2	Meningkatnya Harmonisasi Penataan Produk Hukum Daerah	Persentase Target Tersusunnya Produk hukum daerah yang harmonis	%	100	416,67	416,67

3.3. Analisis Capaian Kinerja sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Sasaran I : MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Sasaran “Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah” ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Nilai LPPD. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan. Sedangkan, Indikator Nilai LPPD dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

Indikator Pertama adalah nilai akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban bagi Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Daerah. Indikator Kineja Nilai Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan. Perbandingan antara target dalam perjanjian kinerja dan realisasi kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	*B	100%

Sumber data: Bag. Organisasi (*Data tersebut merupakan nilai LKIP Tahun 2015 yang ditetapkan di Tahun 2016)

Nilai Akuntabilitas Kinerja dinilai berdasarkan 5 komponen nilai yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Berdasarkan 5 (lima) komponen nilai tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dikategorikan dalam 7 (tujuh) predikat sesuai dengan yang tertuang dalam Permenpan RB No.12 Thn.2015 yaitu:

Tabel 3.3

Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik
5.	CC	>50-60	Cukup
6.	C	>30-50	Kurang
7.	D	0-30	Sangat Kurang

Sumber data: Permenpan RB No.12 Thn 2015

Jika dilihat dari tabel diatas bahwa Target nilai Akuntabilitas Kinerja adalah B (baik) dengan ring nilai antara 60 s/d 70. Sedangkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 yang diperoleh di tahun 2016 adalah B dengan skor nilai sebesar 64,74. Capaian ini telah sesuai dengan target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2016.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2016 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Tahun sebelumnya dengan Realisasi Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2016	
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	C	B	B	B	B

Sumber Data: Bag. Organisasi

Grafik 3.1

Perbandingan Nilai yang diperoleh Tahun 2013 s/d 2016

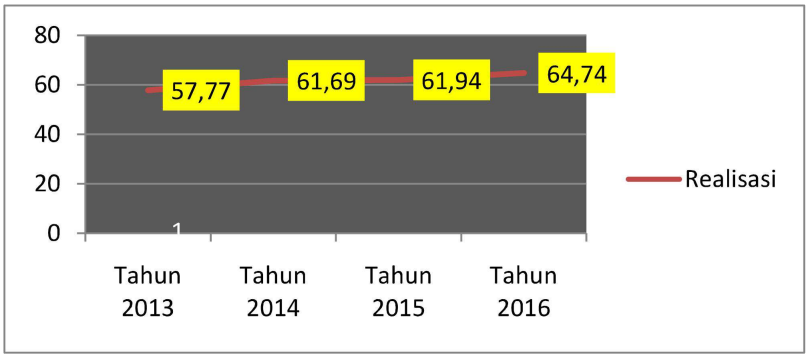

Jika dilihat dari Grafik diatas nilai LKIP Kota Bontang yang diperoleh Tahun 2013 s/d 2016 terus mengalami peningkatan. Adapun keberhasilan sasaran ini yaitu memaksimalkan koordinasi antar SKPD selain itu juga dilakukan pendampingan Penyusunan LKIP yang dilakukan oleh Propinsi. Akan tetapi dalam proses penyusunannya tentu tidak luput dari kendala yang dihadapi yaitu tingkat validitas data sering terabaikan karena belum optimalnya koordinasi pada internal bagian bagian dalam SKPD, serta masih rendahnya komitmen SKPD dalam penyampaian laporan kinerja kegiatan oleh karena itu penting untuk memaksimalkan kontrol dan koordinasi.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2016 dengan target dalam Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target Renstra 2016	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun 2016
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	B	100%

Sumber Data: Bag. Organisasi, Renstra 2016-2021

Jika dilihat pada tabel diatas bahwa realisasi nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 telah sesuai dengan Target dalam Renstra. Untuk mendukung indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja menetapkan anggaran sebesar Rp. 139.160.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 137.772.000,00 atau 99 %. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja yang telah dicapai menunjukkan efisiensi sebesar 1%. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6
Tingkat Efisiensi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%	99%	1%

Sumber Data : Laporan Keuangan per Desember 2016

Berikut merupakan dokumentasi Nilai Akuntabilitas Kinerja:

Gambar 3.1

Dokumentasi Nilai Akuntabilitas Kinerja

Gambar 3.1 Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas perolehan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 yang ditetapkan di Tahun

Indikator Kedua Nilai LPPD. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) digunakan sebagai instrument pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat. Indikator Kinerja Nilai LPPD dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan. Perbandingan antara target dalam perjanjian kinerja dan realisasi kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	ST	ST	100%

Sumber Data: **Bag. Pemerintahan (*Data tersebut merupakan nilai LPPD Tahun 2014 yang ditetapkan di Tahun 2016)**

Jika dilihat dari tabel diatas bahwa nilai LPPD Tahun 2014 yang ditetapkan di tahun 2016 adalah ST (Sangat Tinggi). Kota Bontang menempati peringkat 17 dengan Skor nilai 3,0295. Nilai LPPD Tahun 2014 yang ditetapkan di Tahun 2016 tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800-35 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2014. Di dalam penilaian LPPD ini membutuhkan waktu 2 (dua) tahun hingga penilaian ditetapkan. Penetapan nilai tersebut diumumkan dalam HUT OTDA yaitu setiap tahunnya pada tanggal 25 April.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2016 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Tahun sebelumnya dengan Realisasi Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2016	
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	T	ST	ST	ST	ST

***Sumber Data*: Bag. Pemerintahan**

Grafik 3.2
Perbandingan Skor dari Tahun 2013 s/d 2016

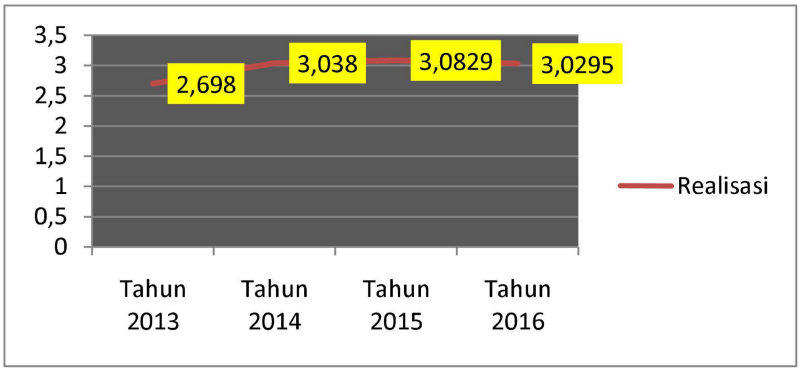

Jika dilihat pada grafik diatas skor LPPD pada Tahun 2011 yang ditetapkan di Tahun 2013 sebesar 2,698 (T) dan meningkat pada tahun 2012 yang ditetapkan di Tahun 2014 dengan skor 3,038 (ST). Skor di Tahun 2013 yang ditetapkan tahun 2015 mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 3,0829 (ST) kemudian skor Tahun 2015 yang ditetapkan di Tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 3,0295. Penurunan skor ini tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi yaitu lambat dan tidak validnya data yang diterima dari SKPD, selain itu penyampaian data masih dianggap sebagai suatu formalitas sehingga berbagai aspek pencapaian validitas data sering terabaikan. Oleh karena demi memaksimalkan penyusunan LPPD solusi yang dilakukan yaitu dengan memaksimalkan koordinasi dengan SKPD, melaksanakan workshop penyusunan LPPD, serta melaksanakan Orientasi Lapangan Penyusunan LPPD.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi dengan Target dalam Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target Renstra 2016	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun 2016
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	ST	ST	100%

***Sumber Data*: Bag. Pemerintahan**

Jika dilihat pada tabel diatas bahwa realisasi nilai LPPD Tahun 2016 telah sesuai dengan target Renstra. Untuk mendukung indikator kinerja Nilai LPPD Sekretariat Daerah menetapkan anggaran sebesar Rp. 202.690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 155.312.000,00 atau 76,63 %. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja yang telah dicapai menunjukkan efisiensi sebesar 23,37% seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Tingkat Efisiensi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	100	76,63	23,37

***Sumber Data*: Laporan Keuangan per Desember 2016**

Sasaran II : MENINGKATNYA HARMONISASI PENATAAN PRODUK HUKUM DAERAH

Sasaran “Meningkatnya Harmonisasi Penataan Produk Hukum Daerah” ini diukur melalui satu indikator kinerja yaitu persentase target tersusunnya produk hukum daerah yang harmonis, dilaksanakan melalui satu program yaitu program penataan peraturan perundang undangan.

Perbandingan antara target dalam perjanjian kinerja dan realisasi kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya harmonisasi penataan produk hukum daerah	Persentase target tersusunnya produk hukum daerah yang harmonis	%	100	416,67	416,67

***Sumber Data*: Bag. Hukum**

Jika dilihat dari tabel diatas bahwa indikator persentase target tersusunnya produk hukum daerah yang harmonis capaiannya adalah 416,67%. Pada Tahun 2016, target dari Produk Hukum daerah adalah sebesar 6 Perwali dan 6 Perda sedangkan dari data yang diperoleh terdapat 40 Perwali dan 10 Perda yang ditetapkan pada Tahun 2016. Capaian ini tentu jauh melampaui dari target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2016.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2016 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Tahun sebelumnya dengan Realisasi Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun Sebelumnya			Tahun 2016	
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Target	Realisasi
1	Meningkatnya harmonisasi penataan produk hukum daerah	Persentase target tersusunnya produk hukum daerah yang harmonis	Persen	350	491,66	283,33	100	416,67

***Sumber Data:* Bag. Hukum**

Grafik 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun 2013 s/d 2016
(Perwali dan Perda)

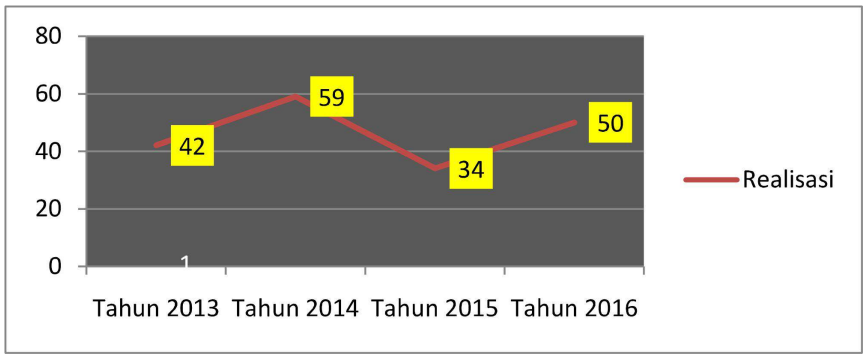

Jika dilihat dari grafik diatas bahwa realisasi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi di Tahun 2013 terdapat 42 produk hukum yang terdiri dari 30 Perwali dan 12 Perda yang ditetapkan, di Tahun 2014 naik menjadi 59 produk hukum yang terdiri dari 50 Perwali dan 9 Perda yang ditetapkan. Di Tahun 2015 produk hukum mengalami penurunan menjadi 34 produk hukum yang terdiri dari 24 Perwali dan 10 Perda yang ditetapkan, dan di Tahun 2016 mengalami kenaikan kembali menjadi 50 Produk hukum yang terdiri dari 40 Perwali dan 10 Perda.

Adapun keberhasilan capaian di Tahun 2016 ini yaitu dengan memaksimalkan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait, sehingga Produk Daerah dapat segera ditetapkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu tidak luput dari kendala yang dihadapi yaitu lamanya jadwal fasilitasi Propinsi sehingga memperlambat proses penetapan dari Produk hukum yang dihasilkan, apabila tidak dilakukan fasilitasi maka Produk Hukum tersebut dapat dibatalkan. Oleh karena itu perlu untuk meningkatkan kuantitas kompetensi koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis pelaksanaannya selain itu perlu adanya SDM yang kompeten untuk terus mengakses data produk hukum terbaru sesuai urutan perundang-undangan sebagai dasar dalam pembuatan produk hukum daerah.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2016 dengan target dalam Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target Renstra 2016	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun 2016
1	Meningkatnya harmonisasi penataan produk hukum daerah	Persentase target tersusunnya produk hukum daerah yang harmonis	%	416,67	100	416,67

Sumber Data: **Bag. Hukum**

Jika dilihat dari tabel diatas bahwa realisasi dari indikator kinerja Persentase target tersusunnya produk hukum daerah yang harmonis Tahun 2016 lebih tinggi dari target dalam Renstra. Untuk mendukung indikator kinerja Persentase target tersusunnya produk hukum daerah yang harmonis, Sekretariat Daerah menetapkan anggaran sebesar Rp. 41.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 41.234.000,00 atau 98,65%. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja yang telah dicapai menunjukkan efisiensi sebesar 318,02% seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya harmonisasi penataan produk hukum daerah	Persentase target tersusunnya produk hukum daerah yang harmonis	416,67	98,65	318,02

***Sumber Data*: Laporan Keuangan Per Desember 2016**

3.4. Realisasi Anggaran

Berdasarkan dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 Sekretariat Daerah menetapkan pagu anggaran Rp 121.901.421.213,00. Dari pagu anggaran tersebut, realisasi keuangan sampai dengan 30 Desember 2016 sebesar Rp 103.442.824.740,00 atau 84.86%. Pagu anggaran tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pagu anggaran dan realisasi keuangan Sekretariat Daerah per program dan kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.15
Realisasi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Anggaran				Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	% Capaian	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai	ST	ST	100%	**Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan**				
							Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rp. 202.690.000,00	Rp. 155.312.000,00	76,63%	Bag. Pemerintahan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	B	100%	**Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan**				
							Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang	139.160.000,00	137.772.000,00	99%	Bag. Organisasi
2	Meningkatnya harmonisasi penataan produk hukum daerah	Persentase target tersusunnya produk hukum daerah yang harmonis	%	100%	100%	100%	**Program Penataan Peraturan Perundang Undangan**				
							Penyusunan dan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah	Rp. 41.800.000,00	Rp. 41.234.000,00	98,65%	Bag. Hukum

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bontang tahun 2016 merupakan wujud dari pertanggung jawaban perjanjian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas LKIP.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bontang tahun 2016 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) program. Dari seluruh indikator kinerja tersebut, terdapat 2 (dua) indikator kinerja tercapai sesuai dengan target, 1 (satu) indikator kinerja melampaui target yang ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bontang tahun 2016 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang berkinerja tinggi sekaligus menciptakan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.